

*Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan
Menurut Pemikiran Karen J. Warren*

**Bernadus Wibowo Suliantoro
Caritas Woro Murdiati Runggandini**

ABSTRAK: Keadilan memiliki cakupan yang luas, melampaui sikap dan iktikat baik seseorang, menyangkut struktur proses politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Inilah inti konsep keadilan sosial. Namun, struktur sering menjadi belenggu sehingga seseorang maupun sekelompok masyarakat tidak memperoleh hak yang wajar. Karena itu, Karen J. Warren berpendapat bahwa penyebab ketidakadilan sosial terletak pada pemikiran *dualistic-hierarchy* dan dominasi. Sebagai gantinya, Warren meramalkan bahwa harmoni kehidupan masyarakat yang plural akan berlangsung baik apabila setiap manusia mengembangkan kerangka kerja konseptual yang menekankan prinsip egalitarian (kesetaraan), keadilan dan kepedulian satu sama lain.

KATA KUNCI: Keadilan sosial, kesetaraan, kepedulian

***Abstract:** Social justice is, more than personal attitude and etiquette, caused by the structure of political, economic, social, and cultural processes. In case that a person and a group of people do not get their natural rights, the fundamental cause must be come from the structure. For this reason, Karen J. Warren proposes that dualistic-hierarcical structure and domination is the cause of social injustice in many forms. She suggests that the harmony of the pluralistic society will be created whenever everybody develops a conceptual framework that emphasizes the principles of equality, justice, and care.*

***KEYWORDS:** Social justice, equality, care*

1. PENDAHULUAN

Konsep keadilan sosial merupakan persoalan filsafat yang bersifat mendasar sekaligus kompleks dalam masyarakat majemuk. Dikatakan mendasar karena terkait dengan sendi-sendi kehidupan manusia yang paling dalam menyangkut penghargaan sekaligus pengakuan diri sebagai subjek bermartabat dalam komunitas beragam. Keadilan sosial tidak hanya ditentukan oleh sikap maupun perilaku perorangan, melainkan lebih oleh struktur proses yang melingkupinya. Struktur proses politik, ekonomi, budaya ataupun agama perlu memberi penghargaan secara wajar bagi setiap individu maupun kelompok yang ada. Terbaikannya hak-hak manusia sebagai pribadi maupun kelompok secara adil akan berakhir dengan penghinaan terhadap martabat manusia.

Keadilan sosial merupakan persoalan kompleks, karena terkait dengan berbagai dimensi kehidupan manusia. Manusia merupakan makhluk multi-dimensional sehingga dalam membangun kehidupan masyarakat secara adil dan beradab ia memiliki keunikan dan kerumitan tersendiri. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan keputusan yang adil. Penekanan terhadap satu aspek akan melahirkan aliran pemikiran kefilsafatan tertentu. Liberalisme memberi perhatian lebih pada penghargaan martabat manusia sebagai pribadi, sosialisme memberi perhatian secara lebih terhadap penghargaan martabat manusia sebagai makhluk sosial. Cara pandang berat sebelah yang menekankan satu aspek kehidupan manusia menjadi kelemahan ketika memahami konsep keadilan sosial dalam hidup bermasyarakat.

Karen J. Warren merupakan tokoh ekofeminis yang berusaha merumuskan konsep keadilan sosial secara lebih komprehensif. Ekofeminisme tidak hanya sebuah aliran pemikiran kefilsafatan melainkan juga gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan dalam perbedaan. Perbedaan merupakan sebuah keniscayaan dalam realitas kehidupan. Manusia berbeda dengan binatang; perempuan berbeda dengan laki-laki, namun di antara perbedaan bagaimana masing-masing pihak memperoleh kedudukan,

tempat dan penghargaan yang adil. Salah satu persoalan etika mendasar dalam kebhinnekaan di masyarakat adalah bagaimana memperlakukan secara adil terhadap para pihak yang berbeda.

Keadilan merupakan nilai bawaan sekaligus merupakan hasil konstruksi pemikiran manusia. Setiap manusia terlahir tidak hanya mampu membedakan antara hal yang baik dengan buruk, melainkan juga dapat membedakan antara yang adil dengan tidak adil. Perbuatan manusia pada hakikatnya digerakkan oleh pola pikir yang melatarbelakanginya. Aktivitas kehidupan manusia tidak berlandaskan pada dorongan instink semata, melainkan digerakkan oleh kerangka pemikiran tertentu. Kerangka pikir merupakan instrumen yang dapat dipergunakan untuk memilah dan memilih antara adil dan tidak adil. Manusia dengan kemampuan berpikirnya pada saat akan mengambil keputusan bertindak senantiasa dihadapkan pada dua pilihan eksistensial yaitu menuju proses pembiadaban atau pemberadaban. Rasio merupakan instrumen yang mengarahkan, membimbing sekaligus mengontrol aktivitas manusia. Rasio dapat menemukan, melanggengkan, memperkuat dapat juga membongkar ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Kesalahan dalam mengembangkan pola berpikir dapat menghasilkan sikap, cara pandang, dan perilaku yang tidak adil terhadap sesama maupun alam.

Karen J. Warren mencoba mengungkap akar masalah terjadinya ketidakadilan sosial dalam masyarakat majemuk. Kerangka pikir *dualistic-hirarkhi-dominatif* dipandang sebagai faktor penyebab utama terjadinya ketidakadilan sosial. Cara pandang dominan seringkali menganalisis realita yang kompleks menjadi dua bagian secara tegas, kaku dan sempit. Laki-laki dipisahkan dari perempuan, manusia dipisahkan dari alam. Di antara perbedaan kemudian diberi labelisasi hirarkhi nilai secara berbeda. Laki-laki diberi tempat, kedudukan dan posisi lebih tinggi dibandingkan perempuan; manusia diberi tempat, kedudukan dan posisi yang lebih tinggi dari alam. Pihak yang merasa memperoleh kedudukan lebih tinggi berhak menguasai terhadap pihak yang diposisikan lebih rendah. Praktik

penindasan diberi argumentasi logis sehingga ketidakadilan nampak sebagai kewajiban yang harus diterima. Gagasan mendasar akar penyebab ketidakadilan yang adil dalam kemajemukan menarik untuk didalami lebih lanjut.

2. BIOGRAFI KAREN J. WARREN

Karen J. Warren merupakan filsof perempuan dari Macalester College St. Paul yang lahir di Amerika Serikat pada tanggal 10 September 1947. Gelar BA bidang filsafat diperoleh pada tahun 1970 dari Universitas Minnesota dan gelar Ph.D diperoleh pada tahun 1978. Bidang ilmu yang ditekuni adalah filsafat feminis khususnya ekofeminisme dan etika lingkungan. Profesi utamanya adalah mengajar, menulis, meneliti dan mempresentasikan seputar persoalan filsafat sosial, filsafat politik, perdamaian, sejarah perempuan, teknik berpikir secara kritis dalam forum nasional maupun internasional. Pengalaman menjadi pembicara dalam forum internasional antara lain di KTT Bumi di Rio Janeiro 1974, konferensi internasional di Buenos Aires, Gothenburg (Swedia), Helsinki, Oslo, Manitoba, Melbourne, Moskow, Perth (Australia), dan San Jose (Kosta Rika) (<http://www.macalester.edu/~warren/> diakses 11 juni 2018). Ide-idenya banyak menjadi inspirasi bagi para filsof ekofeminis, ilmuwan maupun pengambil kebijakan publik.

Warren berusaha “membumikan” pemikiran kefilosofan. Filsafat dipahami sebagai bidang pengetahuan yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Warren lebih suka dirinya diberi predikat sebagai seorang filsof jalanan (<http://www.macalester.edu/~warren/> diakses 11 Juni 2018). Filsafat hendaknya bukan menjadi ilmu yang bersifat elitis yang hanya dapat dimiliki oleh beberapa orang. Obsesinya berusaha mengembangkan filsafat yang secara mudah dapat dipahami oleh semua orang di semua tingkatan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Kegiatan berfilsafat hendaknya mulai diperkenalkan pada diri anak sejak usia dini, karena merupakan fondasi pembentukan kerangka pikir sekaligus pengembangan

bidang pengetahuan yang ditekuni. Kerangka pikir seseorang terbentuk melalui sebuah proses yang terbangun sejak anak usia dini. Berfilsafat merupakan aktivitas yang berusaha mencari kebijaksanaan hidup, oleh sebab itu perlu ditanamkan pada diri anak sejak usia kanak-kanak sampai dengan usia dewasa. Pemikiran kritis sebagai ciri mendasar kegiatan berfilsafat hendaknya dimulai dari pendidikan ditingkat dasar. Berfilsafat merupakan aktivitas yang berusaha mencari kebijaksanaan hidup, oleh sebab itu pengenalan secara berjenjang dan berkesinambungan perlu diperkenalkan pada diri anak sejak dari usia kanak-kanak sampai dengan usia dewasa. Warren mewujudkan komitmen dengan menjadi guru di sekolah dasar, menengah dan pendidikan tinggi lebih dari 33 tahun.

Warren memandang penting ilmu sebagai sarana untuk membuka wawasan sekaligus sebagai media komunikasi dialogal agar manusia dapat berpikir, bersikap dan bertindak lebih bijaksana. Dialog antara etika dengan bidang ilmu perlu dilakukan. Ilmu psikologi dipandang penting dipelajari untuk memperkuat argumentasi pada saat membela arti penting etika kepedulian guna mengimbangi dominasi etika keadilan yang lebih bercorak patriarkhi (Warren,2000:109). Perbuatan manusia pada hakikatnya dipengaruhi oleh kekuatan alam bawah sadarnya. Hasil temuan terhadap cara kerja alam bawah sadar yang dilakukan oleh para psikolog dapat dipergunakan untuk memperkuat arti penting pertimbangan emosi atau perasaan bagi proses pengambilan keputusan moral. Temuan data empiris yang diperoleh dari para psikolog dapat dipergunakan untuk meyakinkan masyarakat bahwa faktor emosi atau perasaan merupakan hal penting dalam pengambilan keputusan di bidang moral. Data temuan pengetahuan ilmiah tersebut dapat dipergunakan untuk mengkritik terhadap cara pandang teori etika keadilan yang seringkali tidak adil karena terlalu mengagung-agungkan peranan rasio dan memandang rendah peran emosi atau perasaan dalam memecahkan persoalan moral.

3. KERANGKA KERJA KONSEPTUAL SEBAB-SEBAB KETIDAKADILAN SOSIAL

Etika merupakan cabang filsafat yang membahas tingkah laku manusia yang dilakukan secara sadar dari sudut pandang baik–buruk. Tingkah laku manusia yang disadari selalu dilatarbelakangi kerangka kerja konseptual tertentu. Kerangka kerja konseptual yang dimaksudkan oleh Warren adalah seperangkat keyakinan, nilai, sikap, perilaku dan asumsi dasar yang membentuk dan merefleksikan bagaimana manusia memandang terhadap dirinya dan dunianya (Warren, 2000:46). Kerangka kerja konseptual membimbing individu maupun kelompok masyarakat pada saat hendak melakukan perbuatan moral maupun pada saat memproduksi pengetahuan. Warren secara khusus memfokuskan pada analisis kerangka kerja konseptual yang berlangsung dalam tradisi pemikiran Barat untuk membongkar praktek penindasan yang berlangsung dalam masyarakat majemuk.

Kerangka kerja konseptual secara moral ada yang bersifat baik, ada pula yang bersifat buruk. Kerangka kerja konseptual yang secara substansial terdapat unsur penindasan dikatakan buruk, sebaliknya yang secara substansial terdapat unsur pembebasan dari ketidakadilan serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama dikatakan baik. Ciri dari suatu kerangka kerja konseptual dikatakan bersifat menindas apabila kerangka kerja tersebut memelihara, membenarkan dan melanggengkan relasi dominasi, diskriminasi dan subordinasi (Warren,1994:184).

Kerangka kerja konseptual bukan merupakan faktor bawaan kodrat yang dimiliki sejak lahir, sekali terbentuk selesai dan sempurna adanya; melainkan merupakan produk konstruksi sosial yang tumbuh dan berkembang melalui pengalaman hidup kompleks. Kerangka kerja konseptual merupakan cara pandang yang terbentuk secara sosial melalui proses sejarah panjang. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan kerangka kerja konseptual di antaranya adalah gender, ras, usia, pendidikan, orientasi perasaan, kebangsaan dan latar belakang religius.

Kerangka kerja konseptual dibangun atas tiga asumsi dasar: (1) pemikiran hierarkis nilai, misal pemikiran “atas-bawah” yang menempatkan nilai, status, atau derajat yang lebih tinggi pada posisi yang ditempatkan di “atas”; 2) dualisme nilai dalam artian menjadikan pasangan disjungtif di mana disjungsi dilihat sebagai oposisi (bukannya komplementer) dan eksklusif (bukan inklusif), dan menempatkan nilai (status, derajat) yang lebih tinggi pada satu disjung bukan pada yang lain (misal dualisme yang memberikan nilai atau status lebih tinggi untuk apa yang secara historis diidentifikasi sebagai “pikiran”, “akal sehat” dan “pria” bukan pada apa yang diidentifikasi sebagai “tubuh”, “emosi”, dan “wanita”); (3) logika dominasi, yaitu struktur argumentasi diarahkan pada pembenaran subordinasi (Warren, 1996:20-21).

Logika dominasi dipandang sebagai faktor utama penyebab munculnya ketidakadilan di masyarakat. Menurut Warren kerangka kerja konseptual hierarki maupun dualisme pada hakikatnya merupakan sesuatu yang bersifat netral, tidak menghasilkan relasi penindasan manakala tidak diikuti dengan logika dominasi. Kerangka kerja konseptual hierarki dan dualisme merupakan hal yang lazim dipergunakan dalam aktivitas kegiatan ilmiah maupun kehidupan sehari-hari pada saat melakukan kegiatan mengklasifikasikan data, membandingkan informasi, dan mengorganisasikan bahan. Pernyataan manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan batu karang merupakan hal yang bersifat benar, wajar dan tidak berimplikasi menjadi persoalan moral ketika tidak diikuti dengan logika dominasi. Secara hierarki ada tanaman yang tumbuh di dataran rendah, ada juga yang di dataran tinggi tidak memunculkan persoalan etika lingkungan. Perbedaan maupun pemisahan makhluk menjadi dua golongan yaitu biotik dan abiotik tidak memunculkan persoalan moral ketika tidak diikuti dengan logika dominasi. Kerangka kerja konseptual hierarki dan dualisme baru memunculkan ketidakadilan ketika premis-premis yang terdapat di dalamnya secara substatif diarahkan pada proses inferioritas salah satu pihak sehingga membenarkan proses subordinasi. Kerangka kerja konseptu-

al hierarkhi dan dualisme baru memunculkan persoalan kemanusiaan dan ekologis pada saat dipergunakan untuk melanggengkan dan membenarkan proses subordinasi terhadap gender atau seks, etnis, ras, kelompok, agama dan juga alam (Keraf, 2006:130-131).

Warren memberikan contoh logika dominasi dalam masyarakat patriarki yang diterapkan dalam relasi sosial antara laki-laki dengan perempuan sebagai berikut:

(A1) Perempuan diidentikkan dengan hakikat dan kenyataan fisik; Laki-laki diidentifikasi dengan kenyataan mental.

(A2) Apa saja yang diidentikkan dengan hakikat dan kenyataan fisik memiliki kedudukan inferior, sedangkan yang diidentikkan dengan mental kedudukan superior.

(A3) Selanjutnya, perempuan memiliki kedudukan inferior terhadap laki-laki; atau sebaliknya laki-laki superior atas wanita.

(A4) Untuk setiap X dan Y, jika X superior atas Y, maka X dibenarkan dalam menguasai Y.

(A5) Selanjutnya, laki-laki dibenarkan menguasai perempuan (Warren, 1996:22).

Kerangka kerja konseptual patriarkat dalam relasi dengan lingkungan sosial menghasilkan pengetahuan yang bias gender. Kesimpulan yang dihasilkan dari logika yang dibangun oleh pola pikir patriarkat (A5) membenarkan terjadinya subordinasi laki-laki atas perempuan. Pembeneran subordinasi laki-laki terhadap perempuan muncul didasarkan atas dua kerangka kerja konseptual opresif sebelumnya yaitu: kerangka kerja dualisme dan hierarki nilai. Kerangka kerja dualisme nilai terdapat pada asumsi (A1) nampak dalam premis yang menyatakan manusia ada yang berjenis kelamin laki-laki ada yang berjenis kelamin perempuan. Manusia yang berjenis kelamin laki-laki memiliki kekuatan mental sedangkan pem-

puan memiliki kekuatan fisik. Kerangka kerja hierarki nilai nampak pada asumsi (A2) yang menempatkan posisi laki-laki memiliki kedudukan lebih superior dibandingkan perempuan. Kerangka kerja dominasi terdapat pada asumsi (A4) nampak dalam pernyataan entitas yang memiliki kedudukan superior (laki-laki) dibenarkan menguasai yang inferior (perempuan).

Kebenaran substansi premis-premis merupakan sesuatu yang diandaikan. Kemampuan mental dalam bentuk berpikir secara rasional dipandang menjadi milik eksklusif laki-laki, sedangkan hakikat perempuan bersifat emosional. Labelisasi yang dilekatkan pada satu entitas tertentu tidak muncul dari hasil penelitian ilmiah mendalam, melainkan hanya berdasarkan pada suatu pengandaian dan kecenderungan dominan. Proses labelisasi diperoleh dengan cara memperhatikan kecenderungan umum yaitu laki-laki dominan mempergunakan rasio, sedangkan perempuan cenderung menggunakan emosi kemudian dilakukan proses generalisasi. Labelisasi diberikan bukan merupakan faktor bawaan biologis yang bersifat kodrati, tetapi lebih pada hasil konstruksi sosial. Nilai-nilai hasil konstruksi sosial disosialisasikan dan diinternalisasikan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Labelisasi diikuti dengan pemberian bobot yang tidak adil dalam artian yang dilabelkan pada laki-laki ditempatkan ke dalam hierarki yang lebih tinggi, sebaliknya yang dilabelkan melekat pada perempuan diberi bobot yang lebih rendah.

Sistem patriarkat tidak semata-mata mengajarkan berpikir logis, tetapi mengarahkan masyarakat mengembangkan opini etis. Opini etis terbangun karena premis-premis yang digunakan untuk menarik kesimpulan mengijinkan adanya perlakuan tidak adil terhadap pihak yang diposisikan lebih rendah. Premis-premis yang dipergunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan secara substantif menggiring pada proses subordinasi. Premis-premis yang dipilih digunakan untuk membenarkan sekaligus melanggengkan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. Patriarki mengembangkan logika dominasi dalam bentuk laki-laki diposisikan sebagai pihak yang selalu dianggap lebih baik, sementara perempuan dipandang buruk

atau kurang bernilai hanya karena jenis kelaminnya (perempuan) (Keraf, 2006:131).

Kritik Warren terhadap patriarkat bukan sekedar ditujukan untuk menyerang mentalitas manusia peorangan, melainkan juga dipergunakan mengkritisi struktur kelembagaan negara. Warren mengkritisi visi dan sikap yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dasar legitimasi penggunaan kekuasaan negara perlu dipertanggungjawabkan secara moral. Warren merujuk pandangan kekuasaan dari pemikiran Kant. Kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memengaruhi orang lain berbuat sesuai dengan yang diinginkan (Warren, 1994: 182). Kekuasaan perlu dikritisi karena secara inheren terkadang terdapat unsur dominasi, selalu ada hasrat mengarahkan pihak lain sesuai dengan cita-cita ataupun keinginannya.

Kekuasaan tidak selamanya berkonotasi buruk secara moral. Baik – buruknya kekuasaan ditentukan oleh visi yang melandasinya. Cara mengenali kekuasaan dijalankan secara baik atau buruk dapat dilihat dari sifat kerangka konseptual yang melandasi latar belakang pemikirannya. Kekuasaan dipandang tidak memiliki validitas keberlakuan secara etis apabila dipergunakan untuk mengekalkan, mempertahankan, membenarkan maupun memproduksi sistem nilai, keyakinan, sikap dan perilaku dominasi (Warren, 2000:200). Penggunaan kekuasaan dipandang tepat atau bermoral apabila dilakukan untuk menghasilkan perubahan guna mengakhiri hubungan penindasan berupa dominasi dan subordinasi. Menurut Warren, pandangan logika dominasi merupakan akar penyebab krisis sosial yang sangat berbahaya apabila digunakan sebagai dasar membangun relasi dalam kehidupan bermasyarakat (Keraf, 2006:131).

4. KEADILAN SOSIAL INKLUSIF SEBAGAI FONDASI PENGATURAN MASYARAKAT MAJEMUK

Kehidupan masyarakat yang majemuk tidak akan memunculkan gejala sosial manakala semua pihak merasa memperoleh tempat, penghar-

gaan dan perlakuan adil. Prinsip keadilan sosial dapat menjadi batu sendi untuk mengharmonisasikan kehidupan masyarakat yang majemuk. Keberlangsungan dan keselamatan hidup manusia dapat terus terjadi manakala proses interaksi dalam kehidupan bermasyarakat berlangsung secara adil dan saling menghargai.

Keadilan hendaknya tidak hanya dibatasi pada relasi dengan sesama manusia, melainkan berlaku bagi semua penghuni kosmos. Warren memandang adanya keterkaitan erat antara keadilan terhadap sesama dan keadilan terhadap alam. Pemanfaatan bumi yang satu perlu terdistribusi secara adil bagi semua penghuni kosmos, baik generasi sekarang maupun mendatang. Warren memiliki keprihatinan mendalam terhadap kondisi alam yang semakin rapuh dan keretakan hubungan sosial semakin lebar akibat kebijakan maupun pola pikir patriarki. Patriarki mengembangkan logika dominasi sehingga membuat alam tereksplorasi dan perempuan termarginalisasi. Penataan kembali pola relasi berdasarkan prinsip keadilan menjadi semakin diperlukan untuk mempercepat pemulihan dan pengharmonisan hubungan manusia dengan masyarakat maupun dengan alam yang telah terganggu. Kesediaan berlaku adil dapat meminimalisasi konflik sosial sekaligus menyelamatkan kerusakan lingkungan.

Warren menggugah kesadaran masyarakat akan adanya keterkaitan erat antara lingkungan fisik dengan lingkungan sosial. Kerusakan lingkungan fisik berdampak negatif terhadap lingkungan sosial, demikian pula sebaliknya. Kesadaran akan adanya keterkaitan antara lingkungan fisik dengan lingkungan sosial membuat Warren memandang perlu kedua persoalan tersebut disinergiskan secara integral. Perjuangan mewujudkan keadilan sosial berwawasan ekologis hendaknya dilakukan dengan cara memecahkan kedua pokok persoalan tersebut secara bersama-sama.

Penggabungan perhatian terhadap persoalan lingkungan sosial dengan lingkungan fisik pada saat membahas keadilan distributif memiliki empat keuntungan: pertama, pertimbangan etis menjadi semakin komprehensif dengan ditambahkan persoalan-persoalan lingkungan pada saat

membahas permasalahan keadilan sosial; kedua, adanya dukungan kerja sama berbagai pihak akan semakin mengefektifkan terwujudnya kondisi masyarakat yang berkeadilan sosial; ketiga, pembahasan keadilan sosial semakin berkualitas karena didukung metode analisis biaya-keuntungan; keempat, penggabungan perhatian persoalan lingkungan sosial dengan lingkungan fisik membantu mengatasi kekurangan kebutuhan-kebutuhan pasar yang penting untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera (Warren, 2000:178-179).

Warren melontarkan gagasan keadilan sosial-inklusif dalam rangka mengkritisi, mengevaluasi serta menawarkan inovasi baru terhadap model keadilan distributif yang dikemukakan oleh Aristoteles. Ide dasar keadilan distributif Aristoteles dibangun atas asumsi bahwa semua orang hendaknya diperlakukan secara sama untuk hal yang sama dan berbeda untuk hal yang berbeda. Ketidakadilan muncul manakala hal yang sama diperlakukan secara tidak sama, atau hal yang tidak sama diperlakukan secara sama (Gie, 1982:23-24). Namun, Aristoteles tidak menjelaskan lebih lanjut tentang “hal apa” yang akan didistribusikan, serta “atas dasar apa” sesuatu tersebut didistribusikan. Hal atau barang yang terdapat di alam ada yang bersifat material adapula non-material. Objek yang didistribusikan berupa barang material dengan non-material memerlukan pertimbangan berbeda.

Warren juga mengkritisi gagasan Aristoteles yang melakukan pembagian secara adil dengan cara mengambil titik tengah di antara dua ekstrim yang dikenal dengan teori “*Juste milieu*”. Dalam perspektif pemikiran Warren tidak semua hal dapat dikalkulasi secara matematis sehingga dapat diketemukan secara tepat titik tengahnya. Keadilan distributif berusaha mencari perhubungan secara tepat antara “apa” yang hendak didistribusikan dengan “dasar” yang dipergunakan untuk mendistribusikannya. Perlakuan berbeda dapat dibenarkan asalkan alasan yang dipergunakan untuk melakukan pembedaan tepat. Pembedaan yang mempergunakan pertimbangan tidak tepat dapat berakhir dengan ketidakadilan.

Warren memperkenalkan lima prinsip pembedaan yang dapat

dipergunakan sebagai dasar dalam keadilan distributif 1). Prinsip manfaat, dalam artian setiap orang memberi kontribusi atau manfaat secara berbeda terhadap masyarakat maupun institusinya; sehingga wajar hak yang diterimaknya pun berbeda satu dengan yang lain. 2). Prinsip kompensasi, dalam artian bahaya maupun risiko dari pekerjaan berbeda satu dengan yang lain, sehingga wajar bagi pekerjaan yang berisiko tinggi memperoleh kompensasi berbeda dengan pekerjaan berisiko rendah. 3). Prinsip kemampuan dalam artian setiap orang memiliki bakat, keterampilan, roh serta kemampuan berbeda-beda sehingga wajar balas jasa yang diterimanya pun beragam berdasarkan kualitas masing-masing pribadi. 4) Prinsip utilitas, dalam artian kinerja yang dilakukan seseorang dalam memberikan kontribusi keuntungan bersih terhadap institusi maupun masyarakat setelah dilakukan analisis biaya-keuntungan berbeda-beda, sehingga wajar apabila penghargaan yang diterima sebagai akibat dari prestasi yang dilakukan juga bervariasi. 5). Prinsip usaha dalam artian pada saat mengembangkan usaha biasanya membutuhkan jaringan kerjasama. Setiap sel atau bagian dari jaringan memberi kontribusi berbeda-beda. Ada rasa bertukar keberutangan jasa antara seorang terhadap yang lain, sehingga anggota jaringan yang aktif berpartisipasi mengembangkan kerjasama diberi keuntungan lebih besar oleh institusi dalam bentuk diskon yang lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang pasif (Warren, 2000: 176-177). Pembedaan atas dasar lima prinsip tersebut dipandang memenuhi kriteria berbuat adil dalam keadilan distributif.

5. MENGEMBANGKAN SINERGI ANTARA ETIKA KEPEDULIAN DAN ETIKA KEADILAN

Keadilan merupakan prinsip moral penting untuk membangun relasi manusia dengan sesama, namun hal tersebut bukanlah merupakan satu-satunya. Warren meragukan kemampuan teori etika keadilan yang mengedepankan penghormatan terhadap hak mampu memecahkan persoalan moral yang terjadi di masyarakat secara komprehensif dan

bijaksana. Permasalahan moral bersifat kompleks dan rumit, sehingga tidak mungkin terselesaikan hanya dengan menggunakan parameter teori etika keadilan saja. Keadilan merupakan salah satu prinsip moral yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan konflik kepentingan antara manusia dengan sesama maupun dengan alam, namun keberadaannya perlu ditopang dengan prinsip moral lain diantaranya adalah prinsip kepedulian.

Warren mengkritik keterbatasan etika keadilan untuk dapat digunakan sebagai parameter tunggal bagi perbuatan moral. Kritik Warren terhadap teori etika keadilan dipengaruhi pemikiran feminis yang mendahuluinya (Warren, 2000:106). Para feminis berjuang supaya cara perempuan melakukan pertimbangan maupun pengambilan keputusan di bidang moral memperoleh pengakuan dan penghargaan setara. Etika keadilan dipandang gagal memberi rasa keadilan terhadap perempuan. Selama ini suara perempuan yang lebih menekankan pada relasi persahabatan, keintiman, kasih sayang, kepedulian, melibatkan unsur perasaan (emosi) kurang memperoleh tempat wajar didalam teori etika keadilan. Pertimbangan moral yang melibatkan unsur emosi atau perasaan dipandang rendah. Emosi perlu disingkirkan karena dipandang merintangai kinerja rasio dalam rangka memperoleh pengetahuan maupun keputusan moral yang benar secara objektif. Cara perempuan melakukan pertimbangan moral kurang dihargai, kurang didengar, kurang diperhatikan, bahkan cenderung diberi stigma negatif dalam teori etika keadilan.

Warren menolak cara pandang dualisme atara rasio dengan emosi dalam proses pengambilan keputusan moral. Rasio dan emosi merupakan dua hal yang berbeda tetapi berada dalam kesatuan fungsi otak. Keputusan moral merupakan hasil sintesis antara rasio dengan emosi. Merujuk hasil penelitian ilmiah psikolog Daniel Goleman dalam bukunya yang berjudul *“Emotional Intelligence”* dikatakan bahwa dalam otak manusia terdapat dua bagian penting yaitu: otak untuk berpikir dan otak untuk merasa. Neokorteks merupakan kumpulan syaraf yang berguna untuk

mengembangkan kemampuan rasio dan logika, sedangkan sistem saraf limbik yang terdiri dari hipokampus dan amigdala merupakan bagian penting untuk mengembangkan fungsi emosi dan memori. Pengembangan fungsi saraf neokorteks akan menghasilkan kecerdasan rasional, sedangkan pengembangan saraf limbik akan menghasilkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional maupun kecerdasan rasional merupakan dua hal berbeda, tetapi peranannya tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling bekerja sama pada saat mengambil keputusan di bidang moral. Kecerdasan rasional tidak dapat bekerja secara efektif tanpa adanya kecerdasan emosional, demikian juga sebaliknya. Tanpa kecerdasan rasional manusia tidak mungkin menyusun logika moral, tanpa kemampuan merasa atau peduli tidak akan ada perbuatan moral (Warren, 2000:109).

Kepedulian merupakan komponen penting mendasari sikap, perilaku dan pemikiran bermoral. Orang baru dapat bersikap adil karena yang bersangkutan memiliki kepedulian terhadap pihak lain. Perbuatan moral baru akan terjadi pada saat ada dorongan untuk peduli terhadap pihak lain. Orang tidak mungkin dapat memberi alasan moral, terdorong melakukan tindakan bermoral, memilih tindakan bermoral, mengevaluasi perbuatan moral ketika yang bersangkutan tidak memiliki kepedulian. Tiadanya kecerdasan emosional tidak saja menghasilkan logika moral yang buruk atau keliru, tetapi juga tidak akan menghasilkan logika moral sama sekali (Warren, 2000:109). Pertimbangan maupun keputusan moral pada hakikatnya merupakan hasil perpaduan antara kemampuan rasio dan kemampuan merasa.

Pendekatan ilmiah psikologi memberi dukungan yang semakin meyakinkan tentang arti penting emosi (khususnya kepedulian) dalam proses pengambilan keputusan moral. Ilmu psikologi memberi dukungan data dan argumentasi ilmiah bahwa aspek emosi memiliki peranan yang sama penting dengan rasio pada saat proses pengambilan keputusan moral. Implikasi moral dari pandangan tersebut adalah argumentasi yang memandang: rasio mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan emosi,

emosi bertentangan dengan rasio sehingga harus disingkirkan merupakan pengetahuan keliru sehingga tidak memadai lagi untuk dipertahankan.

Etika keadilan juga dipandang memiliki konsep diri yang keliru. Manusia diposisikan sebagai individu-individu atomistik memiliki kedudukan terpisah secara tegas satu dengan lain. Agen moral dipandang sebagai makhluk rasional, otonom, bebas dari kepentingan, tidak berpihak dan keberadaannya bersifat independen (Warren, 2000:106). Cara pandang yang mengagungkan kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk otonom memiliki kelemahan, karena dapat mengabaikan tanggung jawab manusia sebagai makhluk sosial. Etika kepedulian memiliki cara pandang bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berusaha mempertahankan ikatan jaring-jaring relasi kebersamaan, keberadaannya melekat bersama dengan orang (makhluk) lain, saling bergantung dengan yang lain, merupakan bagian dari anggota yang lain dan secara historis keberadaannya disituasionalkan (Warren, 2000:106).

Teori etika keadilan juga dipandang telah mereduksi persoalan moral sekedar pengaturan permasalahan hak dan kewajiban yang dapat secara mudah diselesaikan secara deduktif berdasarkan prinsip moral yang berlaku universal. Moralitas sekedar merupakan pengaturan hak dan kewajiban. Prinsip-prinsip moral disusun untuk dipergunakan sebagai sarana mengatur supaya masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Penyelesaian konflik moral dilakukan dengan cara menimbang dan memutuskan ada atau tidaknya prinsip moral yang dilanggar, ada atau tidaknya kepentingan yang terabaikan, ada atau tidak pihak yang dirugikan.

Teori etika keadilan tidak melihat bahwa dalam praktik di masyarakat permasalahan moral terkadang bersifat ambigu sehingga tidak dapat diputuskan secara hitam putih hanya dengan mendasarkan pada prinsip moral berlaku umum, universal menggunakan model berpikir deduktif. Agen moral terkadang dihadapkan pada dilema moral yang tidak dapat secara serta merta diputuskan mendasarkan pada prinsip moral yang berlaku universal. Etika keadilan dipandang telah gagal memahami

persoalan moral yang sebenarnya dengan tidak memasukkan nilai-nilai di luar keadilan (khususnya nilai kepedulian) pada saat memberikan penilaian moral (Warren, 2000:107).

Model penyelesaian persoalan moral dengan cara berpikir deduktif dipandang juga memiliki kelemahan. Ketidakadilan sering terjadi dikarenakan prinsip moral yang digunakan sebagai acuan memecahkan masalah seringkali menggunakan standar yang biasa ditetapkan pada laki-laki. Konsep keadilan sebagian besar diproduksi dengan menggunakan cara berpikir rasional laki-laki, sehingga rumusan yang dihasilkan lebih banyak menguntungkan kaum laki-laki. Mempertahankan teori etika keadilan sebagai satu-satunya parameter mengukur perbuatan moral secara metodologi memiliki kelemahan karena cenderung akan mereproduksi dan melanggengkan kekuasaan demi mempertahankan *status quo* (Warren, 2000:107).

Posisi pemikiran etika Warren tidak secara ekstrim mendukung terhadap teori etika kepedulian kemudian menolak terhadap teori etika keadilan. Memberi dukungan secara fanatik terhadap salah satu teori etika diikuti dengan pengabaian semua teori etika yang ada dapat memunculkan cara pandang monisme. Cara pandang monisme dipandang melanggengkan kerangka berpikir dominasi sehingga perlu dihindari. Warren menolak cara pandang monisme dalam teori etika (Warren, 2000:115). Baik teori etika kepedulian maupun etika keadilan sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Baik etika kepedulian maupun etika keadilan tidak mungkin mampu memecahkan persoalan moral secara sendiri-sendiri, karena persoalan moral sangat kompleks dan saling terkait satu dengan lain. Kedua teori etika tersebut tidak perlu diperlawankan satu dengan yang lain, tetapi perlu diakomodasi karena sama pentingnya untuk membantu manusia mengambil keputusan yang bermoral. Keduanya mempunyai cara dan karakter yang berbeda dalam menyelesaikan masalah moral, tetapi tidak saling mengasingkan satu dengan yang lain. Etika kepedulian dan etika keadilan memiliki hubungan yang erat (Warren, 2000:108).

Warren menempatkan etika keadilan dengan etika kepedulian dalam satu bingkai besar yaitu ke dalam etika keutamaan. Prinsip keadilan dan prinsip kepedulian dipandang memiliki kedudukan setara dan memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan moral. Warren mengibaratkan pengambilan keputusan moral seperti seorang juru masak yang akan membuat kue Pei (Warren, 2000:108). Pada saat akan membuat kue Pei dibutuhkan aneka macam buah seperti pisang, mangga, nanas, jeruk keprok, arbei yang dipersiapkan dalam sebuah keranjang. Buah khusus yang paling cocok untuk dipilih sangat tergantung pada jenis kue Pei yang akan dihasilkan. Pada saat orang akan memasak kue Pei krim pisang, maka buah pisang dipandang yang paling sesuai untuk dipilih. Hal ini bukan berarti buah pisang merupakan buah yang terbaik, sedangkan buah lain kurang baik atau tidak baik. Buah pisang dipilih karena pada waktu itu konteksnya akan membuat Pei pisang. Pilihan buah yang akan menjadi prioritas sangat ditentukan oleh pertimbangan kontekstualitasnya.

Analogi cara kerja juru masak kue Pei seperti gambaran manusia pada saat akan melakukan perbuatan moral. Prinsip-prinsip moral diibaratkan sebagai kumpulan buah-buahan yang tersedia dalam sebuah keranjang. Nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip moral memiliki kedudukan dan bobot kebaikan sendiri-sendiri yang diposisikan secara setara. Nilai keadilan, kepedulian, penghormatan hak asasi, kepentingan diri, amal diri merupakan kumpulan alternatif nilai keutamaan moral yang dapat dipilih pada saat akan melakukan praktek moral. Manusia pada saat akan mengambil keputusan melakukan perbuatan tertentu yang bersangkutan akan menimbang-nimbang untuk memilih prinsip moral yang dipandang paling cocok. Keutamaan moral ditentukan oleh kemampuan memilih prinsip moral yang tepat berhadapan dengan situasi yang konkrit.

Penempatan etika kepedulian dengan etika keadilan dalam satu bingkai etika keutamaan memberi manfaat bagi pengembangan etika kepedulian yaitu: nilai kepedulian diposisikan setara dan sama pentingnya dengan nilai keadilan; dan menghindari keberatan terhadap etika kepedulian

yang seringkali dituduh mengabaikan prinsip keadilan dan tidak memiliki mekanisme untuk mengatur kepedulian agar tidak disalahgunakan secara moral (Halwani,2003:1). Mengagung-agungkan kepedulian kemudian mengabaikan prinsip keadilan secara moral berbahaya. Kepedulian seringkali menyertakan keasyikan dan pengalihan motivasi seseorang akan yang lain. Orang terlalu peduli atau mengasihi seorang penjahat dapat mengakibatkan yang bersangkutan menjadi jahat. Keasyikan dan pengalihan motivasi memungkinkan diri seorang untuk diubah oleh orang yang dipedulikan. Pihak yang melakukan praktek kepedulian dapat menjadi mengadopsi tujuan dari orang yang dipedulikan. Akibatnya, orang dapat bersifat permisif, terlalu memberi pemakluman terhadap perbuatannya, bahkan bisa jadi yang bersangkutan beralih mengadopsi tujuan perbuatan yang berlawanan dengan prinsip moral (Halwani, 2003:4).

6. PENUTUP

Karen J. Warren memiliki pandangan akar masalah terjadinya ketidakadilan sosial adalah terletak pada kerangka kerja pemikiran dualistik-hierarki –dominasi. Kerangka kerja pemikiran dualistik-hierarki-dominasi dalam masyarakat majemuk berdampak negatif merugikan, menindas, memarginalisasikan perempuan maupun kelompok minoritas. Kehidupan masyarakat yang majemuk tidak akan memunculkan gejolak sosial manakala semua pihak memperoleh tempat, penghargaan, dan perlakuan adil. Prinsip keadilan sosial dapat menjadi batu sendi untuk mengharmonikan kehidupan masyarakat majemuk. Ruang lingkup pemberlakuan prinsip keadilan hendaknya diperluas tidak hanya sebatas relasi dengan sesama manusia, melainkan berlaku bagi semua penghuni kosmos.

Penerapan prinsip keadilan sosial dalam praktik kehidupan masyarakat perlu disinergiskan dengan prinsip kepedulian. Orang bersikap adil karena pada hakikatnya yang bersangkutan memiliki kepedulian terhadap pihak lain. Kepedulian merupakan komponen yang mendasari sikap, perilaku, pemikiran maupun perbuatan bermoral. Orang tidak

mungkin dapat memberi alasan moral, terdorong melakukan tindakan bermoral, memilih tindakan bermoral, mengevaluasi perbuatan moral ketika yang bersangkutan tidak memiliki kepedulian. Harmoni masyarakat dalam kehidupan masyarakat majemuk akan tercipta apabila semua pihak mengedepankan prinsip kesetaraan, keadilan dan kepedulian satu dengan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Gie, T.L., 1982, *Teori-Teori Keadilan Sumbangan Bahan untuk Pemahaman Pancasila*, Yogyakarta: Super Sukses.
- Halwani, 2003 , “Care Ethics and Virtue Ethics” dalam *Journal Hypatia*, Vol 18 Number 3.
- Keraf , S.A., 2006, *Etika Lingkungan*, Jakarta : Kompas
- Warren, K. J., 1994, “Toward an Ecofeminist Peace Politics,” dalam buku *Ecological Feminism*, diedit Karen J. Warren, London and New York: Routledge
- _____, 1996, “The Power and The Promise of Ecological Feminism, dalam buku *Ecological Feminist Philosophies*, diedit Karen J. Warren, Bloomington Indianapolis : Indiana University Press.
- _____, 2000, *Ecofeminist Philosophy, A Western Perspective on What It is And Why It Matters* , New York: Roman & litle Fild Publiser, Inc. Lanham.